



DINAS
PERHUBUNGAN
KABUPATEN
GOWA

LAKIP

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

**2
0
2
2**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN.....	3
B.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa	3
B.2 Tugas dan Fungsi	5
B.3 Sumber Daya Manusia	5
B.4 Anggaran.....	7
C. ISU STRATEGI	7
D. RENCANA STRATEGIS	11
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	13
A. TUJUAN DAN SASARAN	13
A.1 Tujuan	14
A.2 Sasaran.....	14
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	16
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	16
D. PERJANJIAN KINERJA 2022.....	19
E. STANDAR PENILAIAN KINERJA.....	22
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
A.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	23
A.2 Realisasi Kinerja Tahun Ini (2022) Dengan Tahun Lalu (2021)	25
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Pada Rencana Strategis.....	29
A.4 Realisasi Kinerja Dengan Mengacu Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Standar Nasional Lainnya	31

A.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang Telah Dilakukan	31
A.6	Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	34
A.7	Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.....	37
A.8	Upaya Perbaikan Pada Perencanaan Berikutnya.....	42
B.	REALISASI KEUANGAN	43
B.1	Realisasi Pendapatan.....	43
B.2	Realisasi Belanja	45
BAB 4	PENUTUP	50

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah perlu adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur sehingga dapat terlihat progres kerja dari pelaksanaan pemerintahan. Perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan perundangan yang mengatur tentang akuntabilitas adalah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sedangkan sarana/ alat untuk melaporkan perwujudan pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (sesuai Permen PAN dan RB nomor : 53 tahun 2014) yang didalamnya terdapat informasi mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa tahun 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi misi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (evaluasi) kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2022. Laporan ini berisi ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Renstra serta pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa 2021 - 2026 adalah : ***“Terwujudnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Aman, Tertib, Lancar dan Selamat Berbasis Teknologi Transportasi”***. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan
2. Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dari sasaran tersebut ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2022, telah berhasil dicapai dengan indikator yang ditetapkan dalam IKU yang kinerjanya mencapai rata-rata 88,87% atau 89% untuk enam indikator kinerja.

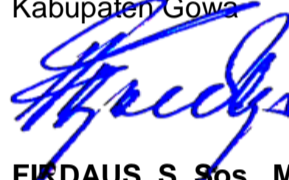
Sedangkan untuk penjabaran 2 (dua) program dan 14 (empat belas) kegiatan hasil evaluasi dan analisis kinerja kegiatan yang mencapai 90%-100%, dengan rata-

rata capaian yang tinggi sebesar 98,18%. Untuk penyerapan anggaran sendiri menunjukkan hasil nilai tinggi untuk 14 kegiatan dengan keberhasilan antara 76,20% sd 100% dengan rata-rata capaian 97,61%. Dari sisi anggaran realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 28.411.273.829,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)** atau 97,61 % dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 29.107.261.234,00 (Dua Puluh Sembilan Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).**

Meskipun hasil evaluasi dan analisis kinerja termasuk dalam kategori berhasil tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala/permasalahan. Namun demikian dengan segala kemampuan yang dimiliki dinas baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya modal/keuangan, semua program/kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2022 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.

Sungguminasa, Maret 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Gowa



FIRDAUS, S. Sos., M.Si

Pangkat : IV/c

NIP 19670821198611100

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1 Berisi:

A. LATAR BELAKANG

- *Maksud dan Tujuan*
- *Dasar Hukum*

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

C. ISU STRATEGIS

D. STRATEGI PERANGKAT DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa adalah salah satu instansi yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupaya membenahi dan pemantapan program dan kegiatan dimana diperlukan persiapan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban yang tepat, cepat dan transparan. Sasaran yang diharapkan dalam LAKIP ini adalah berlangsungnya aktifitas pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Untuk menuju kearah tersebut dibutuhkan adanya pengukuran kinerja yang berfungsi untuk mengadakan penilaian terhadap sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan sebagaimana sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap unit kerja termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2022 berisi tentang ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026.

➤ **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan :

- a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;

- b. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
- c. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;
- d. Dalam rangka tertib administrasi, yang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan bahan pengendalian dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan selama 1 tahun.

Tujuan

Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, serta sebagai bahan evaluasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik keberhasilan ataupun kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya yang menjadi kebijakan dalam penyusunan program/kegiatan.

➤ **Dasar Hukum**

Landasan hukum dalam membuat Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang otonomi daerah adalah urusan wajib dibidang perhubungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi sudah merupakan suatu kebutuhan dan peranannya sangatlah penting dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi,

sosial, budaya, politik dan keamanan serta merupakan urat nadi penunjang proses kegiatan dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebagai penunjang dan penggerak serta pemerata hasil-hasil pembangunan transportasi mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan agar dapat berfungsi optimal.

B. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN

B.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

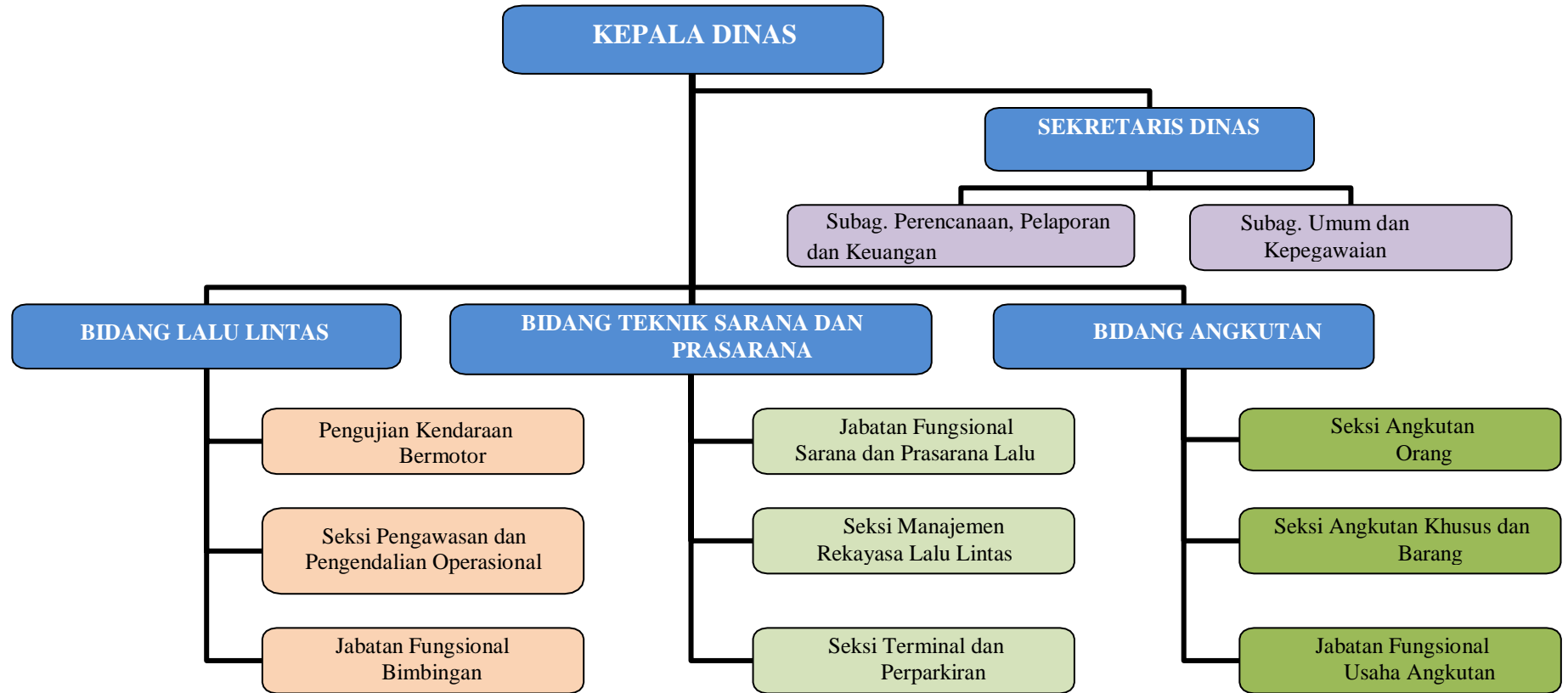
Dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sesuai bagan terlampir di atas.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 terdiri dari : Seorang Kepala Dinas pada Eselon II, seorang sekretaris dan tiga orang kepala bidang yang berada pada Eselon III. Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, dan 3 (tiga) kepala bidang masing–masing membawahi 3 (tiga) kepala seksi/Jabatan Fungsional yang secara struktural berada pada Eselon IV.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa maka tugas dan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.Secara umum fungsi dari sekretariat adalah menjalankan fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.
2. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
 - c. Seksi Bimbingan Keselamatan.
3. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
 - b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Terminal. Hal Ini dapat terlihat dari gambar struktur organisasi berikut ini :

1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa



B.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik seperti yang dijelaskan dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa maka tugas dan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut :

➤ Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang - undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi yakni :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

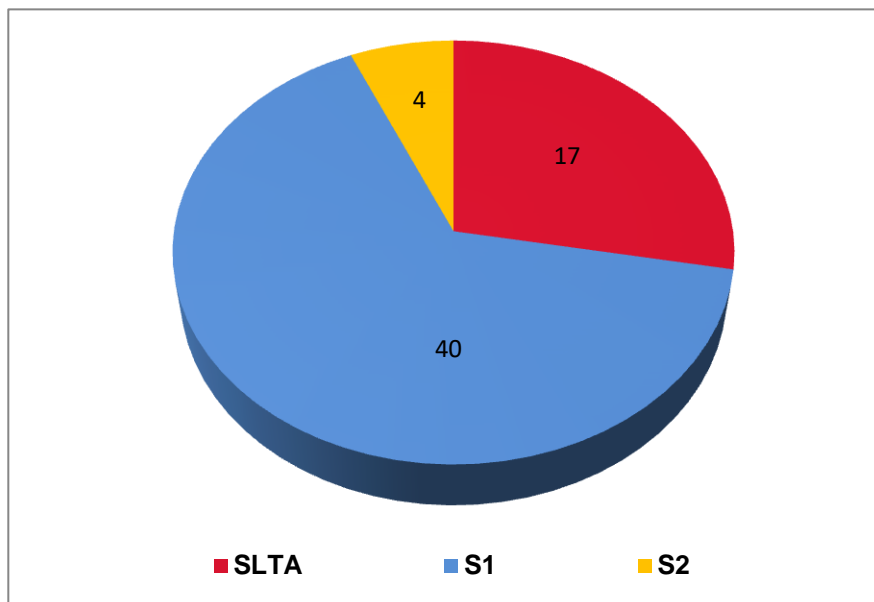
B.3 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang perhubungan. Dimana tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melaksanakan ketugasan.

Pada tahun 2022 sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa meliputi :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Komposisi PNS berdasarkan Pendidikan yaitu : SLTA sebanyak 17 Orang, S1 sebanyak 40 Orang dan S2 sebanyak 4 Orang.

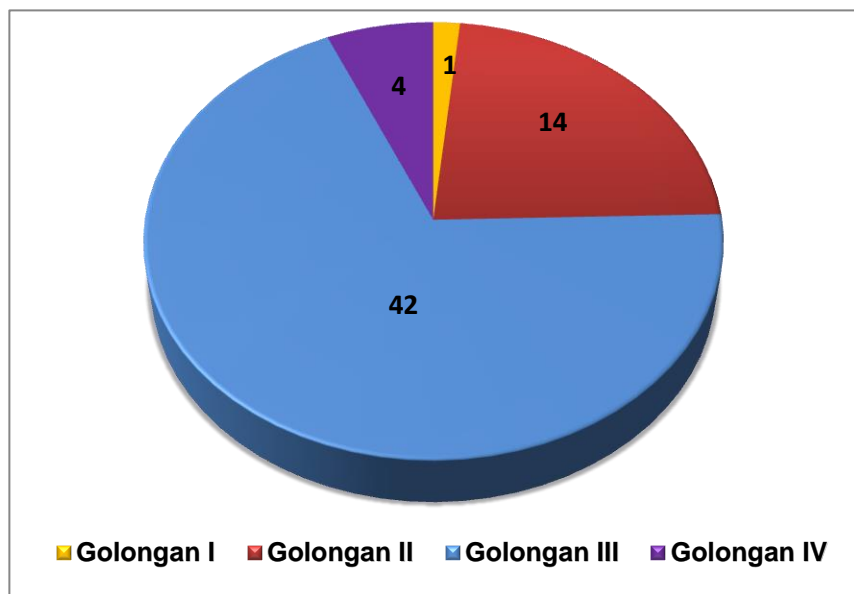
Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan yaitu Golongan IV sebanyak 4 Orang, Golongan III sebanyak 42 Orang, Golongan II sebanyak 14 Orang dan Golongan I sebanyak 1 Orang

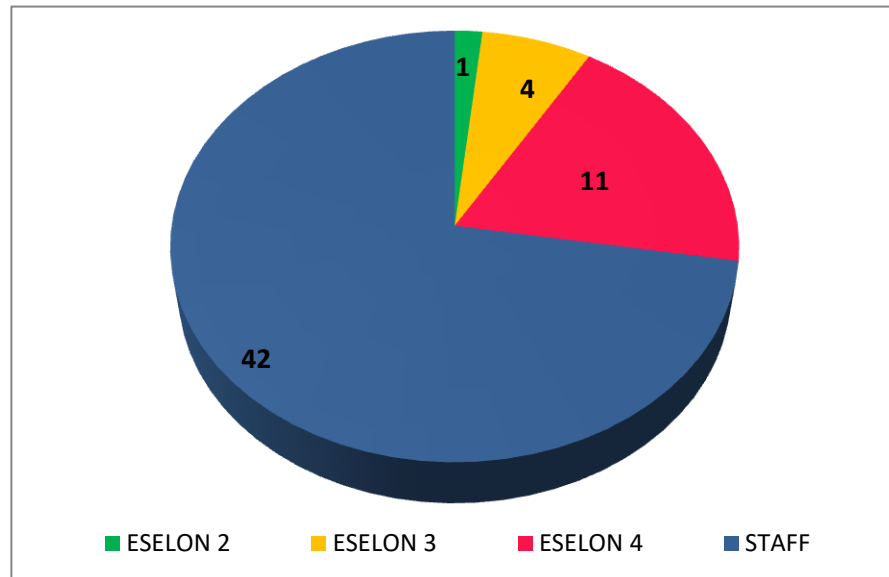
Grafik 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan



c. Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

Komposisi PNS berdasarkan eselon dan Non Eselon terdiri atas : 1 orang Eselon 2, 4 orang Eselon 3, 11 Orang Eselon IV dan 42 Non Eselon (staf).

Tabel I.3
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf



B.4 Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Rencana Kerja tahunan, Dinas Perhubungan mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Gowa. Pada Tahun Anggaran 2022 mendapat dukungan Anggaran sebesar **Rp 29.107.261.234,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Ratus Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).**

C. ISU STRATEGI

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan

strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu yang strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa di antaranya adalah :

1. Pelayanan Publik (Kesekretariatan)
 - a. Pengusulan rekrutmen pegawai/CPNS yang memiliki dasar keilmuan transportasi
 - b. Penyusunan database terkait perhubungan
 - c. Peningkatan SDM pegawai Dinas Perhubungan
2. Pelayanan Angkutan (Bidang Angkutan)
 - a. Pengoptimalan simpu-simpul angkutan umum yang dilengkapi dengan halte/*shelter*.
 - b. Pengoptimalan penggunaan angkutan umum dengan perbaikan pelayanan, sarana dan prasarana angkutan umum.
 - c. Penyediaan terminal angkutan barang khusus.
 - d. Peningkatan disiplin pengemudi angkutan umum dan angkutan barang/khusus melalui sosialisasi.
 - e. Pengoptimalan penggunaan angkutan umum dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi melalui penciptaan instrumen kebijakan dan melalui sosialisasi.
3. Pelayanan Lalu Lintas (Bidang Lalu Lintas)
 - a. Penertiban pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang tidak memiliki Analisis Dampak lalu Lintas.
 - b. Pelaksanaan Sosialisasi keselamatan dan tertib berlalu lintas.
 - c. Peningkatan sarana dan prasaran pengujian kendaraan bermotor.
 - d. Peningkatan SDM anggota Dalops.
 - e. Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
 - f. Kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan, khususnya pada jam-jam sibuk.
4. Pelayanan Sarana dan Prasarana (Bidang Sarana dan Prasarana)
 - A. Peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan jalan
 - B. Peningkatan sarana dan prasarana terminal
 - C. Pengidentifikasian dan penertiban titik-titik parkir.

Berikut isu-isu terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa :

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pelayanan angkutan umum belum optimal	Masih rendahnya pelayanan angkutan	Tingginya tingkat pertumbuhan

		umum	kepemilikan kendaraan pribadi
		Kondisi angkutan umum yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi	Semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan online
2.	Ketersediaan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan lalu lintas belum optimal	Banyak kebutuhan fasilitas dan perlengkapan yang belum terpenuhi	Belum tersedianya data base kebutuhan fasilitas jalan dan perlengkapannya
			Fasilitas perlengkapan jalan yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan/penggantian
			Terbatasnya anggaran pada Dinas Perhubungan untuk pembangunan sarana dan prasarana secara menyeluruh
3.	Lokasi parkir dan bongkar muat angkutan barang belum tersedia	Bongkar muat masih menggunakan badan jalan	Belum adanya terminal angkutan barang khusus
4.	Kemacetan lalu lintas	Banyaknya jumlah kendaraan dan adanya parkir di badan jalan	Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan
			Banyak tempat usaha/perdagangan dll yang belum mempunyai Dokumen/ Rekomendasi

			ANDALALIN
			Belum adanya instrumen kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi (TDM)
			Kedisiplinan pengemudi yang rendah, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas
			Jumlah pegawai Dinas Perhubungan yang bertugas mengatur lalu lintas masih kurang
5.	Penyelenggaraan pelayanan terminal belum memadai	Terminal tidak beroperasi secara optimal	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di terminal Tipe C yang memenuhi standar pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa terminal
6.	Pengelolaan perparkiran belum optimal	Tidak adanya data terkait parkir	Banyak lokasi parkir yang belum dikelola secara maksimal
7.	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor belum optimal	Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Keterbatasan anggaran Dinas Perhubungan
8.	Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian	Jumlah pegawai Dinas Perhubungan yang pernah mengikuti Diklat	Tidak adanya formasi CPNS bidang transportasi

	di bidang Perhubungan masih kurang	Teknis masih sangat kurang	Terbatasnya jumlah anggaran pada Dinas Perhubungan untuk Pendidikan dan Pelatihan
9.	Pembinaan dan penegakan aturan terkait perhubungan belum optimal	Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat	Lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. RENCANA STRATEGIS

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 diimplementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan di bidang perhubungan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Tolak ukur keberhasilan suatu program kegiatan ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Perhubungan sehingga semua permasalahan-

permasalahan yang timbul bisa segera diatasi. Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kinerja di bidang Perhubungan dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Dan hal yang paling penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

BAB 2 Berisi:

A. TUJUAN DAN SASARAN

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

D. PERJANJIAN KINERJA

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra), merupakan langkah awal yang dilakukan `Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional, regional dan global dengan tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergik, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis adalah juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Gowa dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 s/d 2026.

Visi

Semakin meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Untuk itu harus selaras dan memperhatikan visi Kepala daerah Kabupaten Gowa sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Kabupaten Gowa yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa periode 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”

Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, diperlukan misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi yang diemban Misi Kabupaten Gowa sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 Adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya local dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Gowa dimana Dinas Perhubungan masuk pada misi ke tiga (3) yaitu : ***“Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan”***, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

A.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa yang merupakan penjabaran dari sasaran yang ada pada RPJMD Tahun 2021-2026 adalah : ***“Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan selamat berbasis teknologi transportasi”***,

A.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam indikator kinerja organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dalam Renstra periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan bidang perhubungan
- b. Meningkatnya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan

TABEL 2.1 MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2021-2026
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang Aman, Tertib, Lancar, dan Selamat Berbasis Teknologi Transportasi	Kinerja Lalu Lintas	Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
				➤ Persentase layanan angkutan darat	10,00%	10,50%	11,03%	11,58%	12,16%	
					➤ Persentase kepemilikan KIR	100%	100%	100%	100%	100%
					➤ Rasio ijin trayek	0,000019	0,000019	0,000019	0,000019	0,000019
					➤ Persentase perlengkapan jalan	46,16%	53,09%	60,01%	66,94%	73,37%
					➤ Rasio Panjang jalan	0,00813	0,00813	0,00813	0,00813	0,00813

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan- ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal

Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa yaitu :

1. Mengembangkan SDM aparatur Dinas Perhubungan terkait PPNS
2. Meningkatkan kegiatan Sosialisasi di bidang Perhubungan
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian
4. Menyusun dokumen database/masterplan terkait bidang perhubungan
5. Meningkatkan kapasitas pengujian kendaraan dan alat uji kendaraan
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perlengkapan jalan, serta sarana dan prasarana perhubungan

Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa adalah :

1. Peningkatan SDM melalui diklat-diklat teknis perhubungan
2. Pembinaan kepada pengemudi angkutan umum dan angkutan barang
3. Sosialisasi lalu lintas tertib, lancar dan selamat
4. Peningkatan disiplin aparatur dan Jukir
5. Penertiban pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang tidak mempunyai ANDALALIN
6. Penegakan peraturan perundang-undangan terkait perhubungan darat
7. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait
8. Peningkatan pengawasan dan penertiban jalur macet
9. Peningkatan Gedung pengujian dan pengadaan alat uji kendaraan
10. Penyediaan APILL/ATCS, *warning light*, rambu-rambu, pagar pengaman, Zona Selamat Sekolah (ZOSS), *water block/road barrier*, RPPJ, *traffic cone*, marka jalan, PJU, terminal dan sarana prasarana perhubungan lainnya.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Dinas pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Nomor 551/107a Tahun 2021. Adapun indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa yaitu :

TABEL 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	➤ Persentase Layanan Angkutan Darat	10,00%	10,50%	11,03%	11,58%	12,16%
		➤ Persentase Kepemilikan KIR	100%	100%	100%	100%	100%
		➤ Rasio Ijin Trayek	0,000019	0,000019	0,000019	0,000019	0,000019
		➤ Persentase Perlengkapan Jalan	46,16%	53,09%	60,01%	66,94%	73,37%
		➤ Rasio Panjang Jalan	0,00813	0,00813	0,00813	0,00813	0,00813

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja dituangkan rencana tingkat capaian tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada, baik pada tingkatan sasaran maupun pada tingkatan kegiatan, yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan rencana kerja meliputi sasaran yang ingin dicapai, program dan kegiatan yang akan dilakukan, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Adapun Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2022 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP Tahun 2022 ini.

Berdasarkan kondisi yang dihadapi dalam hal penanganan pemerintahan, infrastruktur dan pelayanan masyarakat selama ini, maka tentu saja diharapkan adanya perubahan dan peningkatan pelayanan yang jauh lebih baik dari apa yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, baik penataan administrasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban.

Sejalan dengan perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja memerlukan penataan terhadap kondisi tertentu yang sangat berpengaruh terhadap upaya perubahan dan pembaharuan yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan,

D. PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indicator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022.

Perjanjian kinerja dalam hal ini kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Gowa untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan (tahun 2022). Sedangkan hasil dari perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah dibuat di awal tahun 2022 kemarin serta perubahan perjanjian kinerja

tahun 2022, maka Dinas perhubungan Kabupaten Gowa secara umum dapat mewujudkan target kinerja tahun 2022 dengan baik, hasil pengukuran kinerja akan digambarkan pada bab III laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa ini.

Penyusunan perjanjian kinerja yang merupakan kesepakatan untuk mewujudkan suatu kinerja pada tahun 2022, sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas Perhubungan (Eselon II), berisikan Pernyataan untuk mewujudkan Kinerja utama dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya
2. Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan (Eselon II) dengan Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada semua program dan outcome yang dihasilkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Perjanjian Kinerja antara Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dengan Eselon IV (Kasi/Kasubbag dan fungsional) sasaran yang digunakan menggambarkan kinerja operasional pada semua kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggungjawab eselon IV/fungsional serta menggunakan Indikator yang telah ditetapkan.
4. Perjanjian Kinerja antara Eselon IV (Kasi dan Kasubbag) dengan staf Sasaran yang digunakan menggambarkan capaian kinerja operasional semua pegawai/staf sesuai dengan jabatan pelaksana dan indikator yang telah ditetapkan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA (ESELON II)**

TUJUAN		Terwujudnya Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Aman, Tertib, Lancar, Dan Selamat Berbasis Teknologi Transportasi		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.234.023.754,00
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	➤ Persentase layanan angkutan darat	10%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.873.327.480,00
	➤ Persentase kepemilikan KIR	100%		
	➤ Rasio ijin trayek	0,000019		
	➤ Persentase perlengkapan jalan	46,16%		
	➤ Rasio Panjang jalan	0,00813		
J U M L A H				29.107.261.234,00

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	Nilai %	Pencapaian	Kode
1	110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil	Hijau Tua
2	$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil	Hijau Muda
3	$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil	Kuning Muda
4	$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil	Merah

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi:

A. CAPAIAN

KINERJA

B. REALISASI

ANGGARAN

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan secara transparan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta ketegasan atau pertanggungjawaban.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Perhubungan yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2022 ada 2 (dua) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
2. Realisasi Keuangan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

1. Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD
2. Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

A.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KETERANGAN
Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	99,37%	99,37%	Tercapai/ Berhasil
	➤ Persentase layanan angkutan darat	10,00%	8,45%	84,50%	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	➤ Persentase kepemilikan KIR	100%	94,41%	94,41%	Tercapai/ Berhasil
	➤ Rasio ijin trayek	0,000019	0,000016	86,84%	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
	➤ Persentase perlengkapan jalan	46,16%	34,27%	74,24%	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
	➤ Rasio Panjang jalan	0,00813	0,00763	93,83%	Tercapai/ Berhasil
	Rata-rata Capaian Kinerja Instansi				88,87%

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 88,87% di tahun 2022.

Laporan ini diharapkan memberikan gambaran umum tentang tingkat pencapaian sasaran dan Program Kegiatan, baik dalam hal keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022 beserta Indikatornya.

A.2 Realisasi Kinerja Tahun Ini (2022) Dengan Tahun Lalu (2021)

Analisis Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya menggambarkan urutan substansi akuntabilitas kinerja, khususnya bertujuan untuk memperoleh gambaran yang memadai mengenai hakikat dari akuntabilitas itu sendiri. Salah satu cara melakukan analisis ini adalah dengan cara membandingkan antara indikator kinerja dengan realisasi seperti perbandingan antara kenyataan dengan kinerja yang direncanakan.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama RPJMD 2021-2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa pada tahun 2021-2022 tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2
REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA PERIODE RENSTRA 2021-2026
TAHUN 2021 DAN 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	98%	99,37%					99,37				
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	➤ Persentase layanan angkutan darat	10%	8,45%					84,50				
	➤ Persentase kepemilikan KIR	100%	94,41%					94,41				
	➤ Rasio ijin trayek	0,00001 ⁹	0,00001 ⁶					86,84				
	➤ Persentase perlengkapan jalan	35,96%	34,27%					74,24				
	➤ Rasio Panjang jalan	0,00813	0,00763					93,83				

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/ penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

A. Sasaran strategis : Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD

Indikator kinerja 1 : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun untuk pencapaian sasaran 2 ini dapat diukur dari indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target di tahun 2022 sebesar 100%. Pencapaian target pada indikator sasaran ini **“Tercapai/Berhasil”** dengan presentase pencapaian target sebesar **99,37%**.

Rumusan Formula Indikator Sasaran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja SKPD}}{\text{Jumlah Target Kinerja SKPD}}$$

B. Sasaran strategis : Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

a) Indikator kinerja 1 : Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator kinerja persentase layanan angkutan darat dengan nilai rata rata pencapaian 84,50% (Cukup Tercapai/ Cukup Berhasil).

Adapun Rumusan Formula Indikator Sasaran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan Darat}} \times 100 \%$$

Jumlah angkutan darat di tahun 2022 yg jumlahnya sebesar 37.744 unit (*data dari Kantor Samsat Kabupaten Gowa tahun 2022*), hal tersebut sedikit dibandingkan dengan jumlah penumpang angkutan umum sebesar 446.432 orang (*data dari Dinas Perhubungan Bidang Angkutan Seksi Angkutan Orang tahun 2022*) mengakibatkan pencapaian kinerja yang masih kurang.

b) Indikator kinerja 2 : Persentase kepemilikan KIR

Persentase kepemilikan KIR dengan nilai pencapaian sebesar **94,41% (Tercapai/ Berhasil)**.

Adapun Rumusan Formula Indikator Sasaran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n}}{\text{Jumlah Angkutan Umum pada tahun n}} \times 100 \%$$

Hal ini diketahui dari jumlah angkutan umum yang memiliki KEUR di tahun 2022 hanya sebesar 119 unit (*data dari Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2022*) dari 2.130 unit jumlah angkutan umum di Kabupaten Gowa (*data dari Kantor Samsat Kabupaten Gowa tahun 2022*).

c) Indikator 3 : Rasio Ijin Trayek

Indikator kinerja sasaran Rasio Ijin Trayek juga diperoleh dari target yang ditentukan dengan nilai pencapaian sebesar **86,84% (Cukup Tercapai/ Cukup Berhasil)**.

Adapun Rumusan Formula Indikator Sasaran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Hal ini disebabkan karena jumlah izin trayek yang dikeluarkan di tahun 2022 hanya sebesar 13 buah (*data dari Dinas Perhubungan Bidang Angkutan Seksi Angkutan Orang tahun 2022*) dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa sebesar 787.917 (*data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tahun 2022*).

d) Indikator 4 : Persentase Perlengkapan Jalan

Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase Perlengkapan Jalan mencapai **74,24%** maka sasaran berada pada kategori “**Cukup tercapai/Cukup Berhasil**”,

Adapun Rumusan Formula Indikator Sasaran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pemasangan Rambu-rambu pada Tahun n}}{\text{Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100 \%$$

Dengan jumlah pemasangan rambu dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 421 unit (*data dari Dinas Perhubungan Bidang Sarana dan Prasarana Seksi Perlengkapan tahun 2022*) dengan target jumlah pemasangan yang terpasang sebesar 1100 rambu.

e) Indikator 5 : Rasio Panjang Jalan

Demikian halnya dengan rasio panjang jalan dengan capaian sebesar **93,83%** dengan kategori **Tercapai/Berhasil**, dengan Panjang Jalan Kabupaten sesuai SK Jalan 2017 yakni sepanjang 2466,67 (*data dari Dinas Pekerjaan Umum tahun 2022*) dengan jumlah kendaraan sebanyak 323.345 unit (*data dari Kantor Samsat Kabupaten Gowa Tahun 2022*).

Adapun Rumusan Formula Indikator Sasaran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$$

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Pada Rencana Strategis

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah, dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Realisasi Kinerja tahun 2022 sudah tertuang dalam target jangka menengah dalam dokumen perencanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
REALISASI KINERJA YANG MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA				
			2026	2022	2023	2024	2015	2026
1.	Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100				
2.	Meningkatnya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	➤ Persentase layanan angkutan darat	12,16%	8,45%				
		➤ Persentase kepemilikan KIR	100%	94,41%				
		➤ Rasio ijin trayek	0,000019	0,000016				
		➤ Persentase perlengkapan jalan	73,37%	34,27%				
		➤ Rasio Panjang jalan	0,00813	0,00763				

A.4 Realisasi Kinerja Dengan Mengacu Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Standar Nasional Lainnya

Dalam dokumen perencanaan Renstra selama 5 (lima) tahun kedepan, tetap berkaitan kepada program yang ada dalam dalam dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan, namun untuk penentuan Indikator dalam Tujuan, Sasaran, maupun Program tidak menggunakan Indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena pada tahun 2022 belum ditetapkan petunjuk teknis dari Kementerian Perhubungan untuk perhitungan indikator dalam SPM , dan masih dalam pembahasan di level pusat.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2022	2022	2022
1	2	2	4	5	6
	Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		
	Meningkatnya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	➤ Persentase layanan angkutan darat	8,45%		
		➤ Persentase kepemilikan KIR	94,41%		
		➤ Rasio ijin trayek	0,000016		
		➤ Persentase perlengkapan jalan	34,27%		
		➤ Rasio Panjang jalan	0,00763		

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang Telah Dilakukan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat

keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/ Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Startegis : Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD, indikator sasaran untuk indikator sasaran yakni Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah meningkat dari kondisi awal di tahun 2021 yakni 98% menjadi 99,37%.

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan infrastruktur perhubungan yang berkualitas didukung anggaran yang memadai melalui APBD serta terselenggaranya program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran.

- 2) Sasaran Startegis 2 : Meningkatnya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, rata-rata capaian indikator sekitar **86,87%** sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal (100%). Capaian pada sasaran ini bila dirata – ratakan belum optimal dikarenakan masih adanya permasalahan di lapangan antara lain :

- a. Indikator 1 : Persentase Layanan Angkutan Darat dengan capaian indikator sekitar 84,50% (**Cukup Tercapai/ Cukup Berhasil**) dari target persentase sebesar 100%, dikarenakan kurangnya jumlah transportasi angkutan umum dan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan mode transportasi online yang juga lebih mengutamakan kenyamanan para konsumen/ pemakai transportasi. Meskipun telah dilakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum, namun belum mampu mengoptimalkan pencapaian kinerja.

- b. Indikator 2 : Persentase Kepemilikan KIR dengan capaian indikator sekitar 94,41 (**Tercapai/ Berhasil**) dari target persen sebesar 100% yang didukung oleh kegiatan pengujian kendaraan bermotor (KEUR) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan umum, walaupun jumlah kendaraan angkutan umum yang menunjukkan penurunan trend jumlah dari tahun ke tahun namun diharapkan mode transportasi umum ini dapat terus bertambah jumlahnya yang diiringi dengan kenaikan kegiatan pengujian kendaraan bermotor (KEUR) untuk memaksimalkan kinerja pada indikator kinerja ini.

- c. Indikator 3 : Rasio Ijin trayek dengan capaian indikator sekitar 86,84% (**Cukup tercapai/ Cukup berhasil**) dari target rasio sebesar 0,000019, hal ini disebabkan menurunnya jumlah transportasi umum perusahaan dan dibarengi dengan rendahnya kesadaran para pemilik kendaraan umum untuk melakukan pengurusan izin trayek sehingga pencapaian kinerja pada indikator ini kurang tercapai. Meskipun telah dilakukan kegiatan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan izin penyelenggaraan kendaraan angkutan umum, namun hal tersebut belum mampu menunjang pencapaian kinerja pada indikator ini.
- d. Indikator 4 : Persentase Perlengkapan Jalan dengan capaian indikator sekitar 74,24% (**Cukup Tercapai/ Cukup Berhasil**) dari target persen sebesar 46,16%, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk memenuhi keinginan sebagian besar masyarakat akan pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang. Hal lain yang menyebabkan kurangnya pencapaian kinerja indikator ini adalah kurangnya rasa memiliki dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pemeliharaan sarana dan prasana perlengkapan jalan dengan adanya kasus pengrusakan cermin (safety mirror), pencurian rambu dan sarana perlengkapan jalan. Diharapkan melalui kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mampu mengoptimalkan pencapaian kinerja indikator ini.
- e. Indikator 5 : Rasio panjang jalan dengan capaian indikator sekitar 93,83% (**Tercapai/ Berhasil**) dari target rasio sebesar 0,00813, dan diharapkan ke depannya penambahan jumlah kendaraan seiring dengan penambahan panjang jalan guna mengurangi kemacetan lalu lintas. Dengan dukungan panjang jalan maka untuk mengurangi kemacetan, maka perlu disiapkan sarana dan prasarana perlengkapan jalan di beberapa titik melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan pada kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun pertama Renstra hampir tidak ada, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- ✚ Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- ✚ Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/ teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan.
- ✚ Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pekerjaan

A.6 Analisis Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai Tujuan Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan selamat berbasis teknologi transportasi maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- ✚ Sumber Daya Manusia yang kompeten
- ✚ Sumber Dana yang mencukupi
- ✚ Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun tabel Analisis penggunaan sumber daya disajikan dalam tabel :

Tabel 3.4
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 92 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 62 orang.	Masih dibutuhkan 30 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis/ honorer yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Sumber Dana yang dapat menuntaskan Semua	Saat ini sumber dana dapat mencukupi penanganan	Masih membutuhkan sumber dana / anggaran yang	Mengajukan usulan anggaran ke daerah melalui telaah staf

permasalahan infrastruktur kota	kegiatan walaupun belum semua kegiatan dapat terlaksana dengan alasan membutuhkan biaya yang lebih besar	dapat mendukung tujuan dan sasaran dinas	
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja untuk mendukung operasional di lapangan	Sarana Prasarana yang mendukung operasional di lapangan saat ini belum memenuhi	Masih membutuhkan baik alat, kendaraan operasional di lapangan agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien	Mengajukan usulan pengadaan baik alat maupun kendaraan operasional

TABEL 3.5
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	99,37%	99,37	27.234.023.754,00	26.541.648.866,00	97,46	98,41
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	➤ Persentase layanan angkutan darat	10,00%	8,45%	84,50	1.873.237.480,00	1.869.624.963,00	99,70	94,28
	➤ Persentase kepemilikan KIR	100%	94,41%	94,41				
	➤ Rasio ijin trayek	0,000019	0,000016	86,84				
	➤ Persentase perlengkapan jalan	46,16%	34,27%	74,24				
	➤ Rasio Panjang jalan	0,00813	0,00763	93,83				

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD dengan capaian kinerja 99,37% dan capaian anggaran 98,41%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1,59% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 101,59%.
- 2) Indikator Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan capaian kinerja rata-rata capaian 86,76% dan capaian anggaran 94,28%, menunjukkan walaupun ada efisiensi anggaran 5,72% akan tetapi belum efektif karena tidak mampu mencapai kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mencapai kinerja dengan program dan kegiatan yang selaras dengan kinerja yang diharapkan.

A.7 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022 capaian dari output kegiatan tersebut, adapun program dan kegiatan yang ada juga tercantum dalam rencana aksi tahun 2022, adapun capaian program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.6

KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan	Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Survey Kepuasan Masyarakat)	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	99,37	99,37	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4	4	100%	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	33	33	100%	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	162	162	100%	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	44	44	100%	

				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	24	23	95,83 %	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26	26	100%	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	24	23	95,83 %	
2	Meningkatnya Kelancaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas	65	63,44	97,24 %	
		Persentase Perlengkapan Jalan		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan Perlengkapan Jalan	181	181	100%	
		Persentase Kepemilikan KIR		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelayanan Uji Berkala	18.004	20.642	114,65 %	
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	14	14	100%	

		Rasio Panjang Jalan		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan	2	2	100%	
		Persentase Perlengkapan Jalan		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan LLAJ	Persentase Audit Keselamatan	-	-	-	
		Persentase Layanan Angkutan Darat		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten	10	10	100%	
		Rasio Ijin Trayek		Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas yang Memadai	57	57	100%	
		Persentase Layanan Angkutan Darat		Kegiatan Penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	1	1	100%	
						18.586	21.222		

Penjelasan Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Adapun pelaksanaan program yang dilaksanakan di tahun 2022 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa terdiri dari dua yakni :

- ✚ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota
- ✚ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator Program yakni :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan

Indikator :

Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan target 100 telah **berhasil** tercapai sebesar 99,37% . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Capaian program ini ditahun 2022 sebesar 99,37% dari target pencapaian sebesar 100%, hal ini didukung oleh pelaksanaan seluruh kegiatan di sekretariat yang berjalan sesuai dengan target hanya ada beberapa kendala teknis dalam proses pencapaian target yang terjadi seperti keterlambatan konfirmasi ke pihak penyedia barang untuk pengadaan kendaraan operasional lapangan dan kekurangan anggaran untuk biaya pembayaran pajak kendaraan yang diakibatkan adanya denda kendaraan yang lebih besar dari perkiraan anggaran. Namun untuk rata-rata pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai target, sehingga untuk program penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kabupaten Kota pencapaiannya dapat dikategorikan tercapai/berhasil

Sasaran 2 : Meningkatnya Kelancaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Indikator 1 dan 2 :

Persentase Kepemilikan KIR dan Rasio Panjang Jalan, dengan target 100%, 0,00813, 0,000019, dan 10% telah

berhasil/ tercapai dengan baik. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program **Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** . .

Indikator 2 :

Persentase Persentase Perlengkapan Jalan, Rasio Ijin Trayek, dan Persentase layanan angkutan darat dengan target 46,16%, 0,000019, dan 10% telah **cukup berhasil** tercapai dengan baik. Hal ini **disebabkan** :

- Program **Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** dengan belum dapat dilaksanakan dengan baik terutama karena kegiatan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum, penyediaan data informasi tarif kelas ekonomi, Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek serta kegiatan penyediaan perlengkapan jalan belum dapat mencapai output target kinerja di tahun 2022.

Secara menyeluruh untuk Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan capaian kinerja yang ditunjukkan sebesar 97,24% dapat dikategorikan berhasil/tercapai, adapun beberapa kegiatan yang tidak mencapai target kinerja seperti pengujian.

KIR untuk Angkutan yang masih rendah yang disebabkan menurunnya jumlah angkutan umum dan kesadaran para pemilik kendaraan yang juga rendah. Namun untuk kegiatan pengujian kendaraan untuk seluruh jenis kendaraan memiliki perbandingan yang sangat banyak dengan kendaraan khusus angkutan umum yakni pencapaian melebihi target sebesar 114,66%, sehingga pencapaian PAD Kabupaten Gowa melebihi dari target yang ditentukan.

A.8 Upaya Perbaikan Pada Perencanaan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa pada tahun 2022 melalui 7 (tujuh) analisa capaian

kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan bidang perhubungan

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah Mengikutsertakan ASN untuk mengikuti diklat – diklat yang kompeten dengan bidangnya utamanya terkaitan dengan berbagai bidang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan ke masyarakat pengguna pelayanan Pengujian kendaraan bermotor (KEUR), pelayanan pemeliharaan lampu PJU, pelayanan pemberian izin trayek dan pelayanan di bidang lalu lintas.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kelancaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan

1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas.
2. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan akan pentingnya adanya fasilitas perlengkapan di jalan.
3. Melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan penggunaan angkutan umum/ massal guna mengurangi penggunaan mobil pribadi.
4. Mengajak kepada pemilik perusahaan angkutan umum untuk mengurus izin trayek kendaraan serta meningkatkan kenyamanan pengguna angkutan umum
5. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, cermin lalu lintas dan guardrail) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU).

B. REALISASI KEUANGAN

B.1 Realisasi Pendapatan

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2022

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Retribusi Terminal	50.000.000,00	47.300.000,00	94,60%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000,00	1.453.780.000,00	145,38%

Retribusi Parkir	200.000.000,00	280.952.800,00	140,48%
Retribusi Parkir Khusus	100.000.000,00	41.646.600,00	41,65%
Pajak Parkir	30.000.000,00	50.694.718,00	168,98%
Retribusi Izin Trayek (Kartu Pengawasan)	3.000.000,00	520.000,00	17,33%

Analisis Pencapaian target :

Pendapatan terdiri dari :

1. Retribusi Terminal

Retribusi terminal yang merupakan retribusi terminal Samata, terminal Malino dan terminal Malakaji serta Pos Swadaya dan Pos Bontoramba dengan target Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.300.000,00 atau tercapai 94,60 %. Tidak tercapainya target disebabkan karena, berkurangnya kendaraan umum yang beraktifitas di terminal seiring dengan kurangnya jumlah angkutan umum yang juga mempengaruhi tidak tercapainya target untuk pendapatan retribusi terminal.

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan retribusi pengurusan KEUR dengan rincian harga

- mobil Truk (Rp. 85.000,00,
- pick Up Rp. 65.000,00,
- Mobil Khusus/Box Rp. 85.000,00,
- Bus Rp. 65.000,00,
- Mobil Penumpang Rp. 60.000,00,
- Mobil Tiga Roda (Rp. 50.000,00,
- mobil Dinas Rp. 40.000,00)

dengan target Rp. 1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.453.780.000,00 atau melebihi target sebesar 145,38% dikarenakan banyaknya kendaraan dari daerah lain yang melakukan numpang uji di Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

3. Retribusi Parkir

Retribusi parkir yang merupakan retribusi parkir tepi jalan dengan target Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 280.952.800,00 atau melebihi target

140,48%. Hal ini dikarenakan dana retribusi parkir khusus rumah sakit masuk ke rekening retribusi parkir, menyebabkan pencapaian target yang berlebih.

4. **Retribusi Parkir Khusus**

Retribusi parkir yang merupakan retribusi parkir rumah sakit dengan target Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.58.353.400,00 atau kurang dari target sebesar 41,65%, hal ini disebabkan rekening retribusi parkir khusus masuk ke rekening retribusi parkir mulai pada bulan Januari 2022 dan rekening retribusi parkir khusus muncul pada tahap perubahan di bulan Oktober 2022 di akhir tahun menyebabkan pencapaian target yang sangat kurang.

5. **Pajak Parkir**

Pajak parkir yang merupakan pajak parkir tempat usaha (Toko/ Swalayan/ Supermarket dan Rumah Makan) dengan target Rp.30.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 50.694.718,00 atau melebihi target sebesar 168,98%.

6. **Retribusi Izin Trayek (Kartu Pengawasan)**

Retribusi Izin Trayek (Kartu Pengawasan) merupakan retribusi pengawasan ijin trayek dengan target Rp.3.000.000,00 terealisasi hanya sebesar Rp. 520.000,00 atau kurang dari target yakni sebesar 17,33%. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya jumlah angkutan umum perusahaan, dan para pemilik usaha angkutan kurang memiliki kesadaran untuk mengurus perizinan trayek kendaraannya.

B.2 Realisasi Belanja

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa pada tahun 2022 mengalokasikan dan merealisasikan anggaran sebanyak 2 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 14 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 97,61% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 29.107.261.234,00. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)*100 %
	DINAS PERHUBUNGAN			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.234.023.754,00	26.541.648.866,00	97,46%
	Kegiatan Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.929.900,00	12.809.900,00	99,07%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.384.800,00	5.362.800,00	99,59%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.545.100,00	7.447.100,00	98,70%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.769.264.556,00	4.559.135.501,00	95,59%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.698.171.456,00	4.488.198.401,00	95,53%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.519.500,00	55.519.500,00	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	15.573.600,00	15.417.600,00	99%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.748.250,00	22.710.750,00	99,84%
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	22.748.250,00	22.710.750,00	99,84%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.641.438,00	113.529.078,00	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.198.211,00	4.196.000,00	99,95%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.071.227,00	58.011.148,00	99,90%

	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	9.102.000,00	9.051.930,00	99,45%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.270.000,00	42.270.000,00	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	332.856.200,00	253.631.458,00	76,20%
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.077.500,00	214.900.000,00	73,33%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	22.836.000,00	21.790.150,00	95,42%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	16.942.700,00	16.941.308,00	99,99%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.855.240.495,00	21.457.559.670,00	98,19%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.598.077.255,00	21.204.931.230,00	98,18%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.163.240,00	252.628.440,00	98,24%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.342.915,00	122.272.509,00	96,02%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	115.742.915,00	110.672.509,00	95,62%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan lainnya	11.600.000,00	11.600.000,00	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.873.237.480,00	1.869.624.963,00	99,81%
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	762.785.850,00	760.520.850,00	99,70%
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	762.785.850,00	760.520.850,00	99,70%
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	567.450.000,00	566.267.500,00	100%

	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	468.200.000,00	468.200.000,00	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	99.250.000,00	98.067.500	98,81%
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	234.016.933,00	233.851.933,00	99,93%
	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	200.000.000,00	199.835.000,00	99,92%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	34.016.933,00	34.016.933,00	100%
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	291.442.950,00	291.442.950,00	85,72%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	291.442.950,00	291.442.950,00	100%
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	5.700.000,00	5.699.983,00	100%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 kabupaten/kota	5.700.000,00	5.699.983,00	100%
	Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.970.497,00	6.970.497,00	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	6.970.497,00	6.970.497,00	100%

	Kegiatan Penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.871.250,00	4.871.250,00	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.871.250,00	4.871.250,00	100%
		29.107.261.234,00	28.411.273.829,00	97,61%

BAB 4

PENUTUP

Bab 4 Berisi :

- A. KESIMPULAN
CAPAIAN
ORGANISASI**
- B. LANGKAH
PERBAIKAN
KINERJA**

A. KESIMPULAN CAPAIAN ORGANISASI

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ke 1 (satu) dari Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa 2021-2026, keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dapat disimpulkan secara umum hasil capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan penetapan target kinerja tahun 2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) capaiannya sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2022 tersebut didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi;
3. Perlu penambahan anggaran untuk menuntaskan pencapaian target sasaran.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi

pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.